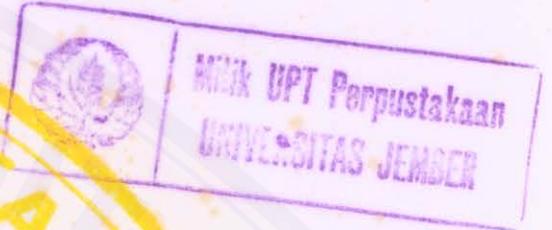


**MEKANISME PEMOTONGAN PPh ATAS INSENTIF BENDAHARAWAN GAJI  
DALAM PEMBERIAN KUPEDAS GOLONGAN BERPENDHASILAN TETAP  
PADA BRI UNIT GAJAH MADA JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

Asal	: Hadiah	8
Terima Tel.	17 OCT 2002	336-24
		SUP m

Oleh :

**Herry Supratman**

NIM. 990903101073

Dosen Pembimbing :

**Drs. H. HARTONO DJULIANTO**  
NIP. 130 610 497

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**2002**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Kerja Nyata (PKN) program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Herry Supratman

NIM : 990903101073

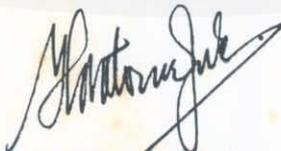
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : MEKANISME PEMOTONGAN PPh ATAS  
INSENTIF BENDAHARAWAN GAJI DALAM PEMBERIAN KUPEDES  
GOLONGAN BERPENGHASILAN TETAP PADA BRI UNIT GAJAH  
MADA

Jember, 23 Mei 2002

Menyetujui  
Dosen Pembimbing



Drs. H. Hartono Djulianto  
NIP. 430 610 497

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : HERRY SUPRATMAN  
N I M : 990903101073  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**MEKANISME PEMOTONGAN PPh ATAS INSENTIF BENDAHARAWAN  
GAJI DALAM PEMBERIAN KUPEDES GOLONGAN BERPENGHASILAN  
TETAP PADA BRI UNIT GAJAH MADA JEMBER**

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Juli 2002  
Jam : 15.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Anggota

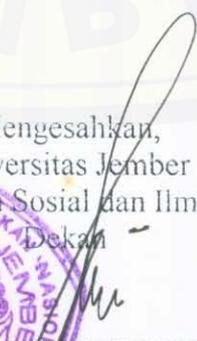
  
Drs. H. HARTONO DJULIANTO  
NIP. 150 610 497

Ketua

  
HARY KARYADI, SE. Ak  
NIP. 132 231 419

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



  
Drs. H. MOCH TOERKI  
NIP. 1130 524 832

## Motto

Orang tidak akan mencapai kebebasan,  
karena diam tiada bekerja,  
juga ia tak kan mencapai kesempurnaan  
karena menghindari kewajibannya.

( S. Pendit, Nyoman. 1986 BAGAVADGITA, BF Dharma Nusantara, Jakarta )

**Bayarlah Pajak sedini mungkin, agar anak cucu kita tidak menuduh  
bahwa kita telah hidup tidak berguna.**

**( Berita Pajak No. 1391 / TH. XXXI / 15 Maret 1999 )**

Jika kamu ingin kebahagiaan di dunia maka kamu akan memperolehnya  
dengan ilmu

Jika kamu ingin kebahagiaan diakhirat maka kamu akan  
mendapatkannya dengan ilmu

Dan Jika kamu ingin kebahagiaan di dunia dan di akhirat kamu juga akan  
mendapatkannya dengan ilmu

**( Al Hadist )**

## PERSEMBAHAN

Laporan ini Kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda SUNARYA dan Ibunda MAIYA yang telah memberikan kasih sayang dan Do'anya serta jerih payahnya dalam memberikan nafkah untuk penulis sehingga penulis bisa kuliah dan akhirnya bisa menyelesaikan penulisan laporan ini.
2. dr. Lulu tersayang yang selalu meyangiku dan Adik – adikku tercinta “Yuli dan Kiki “ yang telah mengisi hari – hariku dengan senyum, tawa serta canda.
3. Ibu Rindang Bazar yang terhormat, sebagai pengganti kedua orang tuaku selama kost di Jember.
4. Dewi Puspita Sari yang menjadikan hidupku lebih bermakna
5. Temanku di Riau 10: mas ( B-Agus, Kholid, Hamo, Ony, Gojes, ) KonNdor, Rizol Arizona, Peny, Peng Ferry, Rahmat, Topik, Adi sair berdarah, Tuan Takur, Rosy, Ajeng, Jepang, Yusron Crot, Deny kebo, Bimo Surimo, Widi, Bakti, Kang Jay, makasih atas kebersamaannya.
6. Kawan – Kawanku : Dwi, Dian ( R - N ), Dina, Irul, Any, Erfa, Nina, Endah, Widya, Nunun, Yunita, Netty, Sully dan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, “I love you “
7. Almamater Tercinta.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan laporan akhir ini dengan judul “ *Mekanisme pemotongan PPh atas insentif Bendaharawan gaji dalam pemberian Kupon golongan berpenghasilan tetap pada BRI Unit Gajah Mada Jember* “.

Adapun penulisan laporan akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya ( A. Md ) Perpajakan Program Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dengan selesainya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) dan penulisan laporan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Mud’har Syarifudin, Msi, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Drs. Akhmad Toha, Msi, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan.
4. Drs. H. Hartono Djulianto, selaku Dosen pembimbing yang telah berkenan memerikan arahan dan bimbingan selama penulisan laporan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta para staf tata usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Moch. Sholeh, selaku Kepala Unit yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di BRI Unit Gajah Mada Jember.
7. Imam Agus M, selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di BRI Unit Gajah Mada Jember, beserta para staf dan karyawan yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Ayahanda Sunaraya dan Ibunda Maiya yang telah memberikan kasih sayang dan Do’anaya serta jerih payahnya dalam memberikan nafkah untuk penulis sehingga penulis bisa kuliah dan akhirnya bisa menyelesaikan penulisan laporan ini.
9. Ibu Rindang Bazar yang terhormat, sebagai pengganti kedua orang tuaku selama kost di Jember.
10. Dewi Puspita Sari yang telah menjadikan hidupku lebih bermakna.

11. Teman – Temanku “ Tour With Love Bandung 7 – 12 Oktober 2001”  
Diploma III Perpajakan 1999.
12. Saudaraku senasib dan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam  
Komisariat FISIP.
13. Rekan – Rekan di Dewan Perwakilan Mahasiswa ( DPM ) Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik periode 2002 – 2003
14. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
serta Almamater tercinta.

Penulis berharap agar apa yang telah ditulis ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak khususnya yang berkaitan dengan masalah “ perpajakan.

Jember, Mei 2002

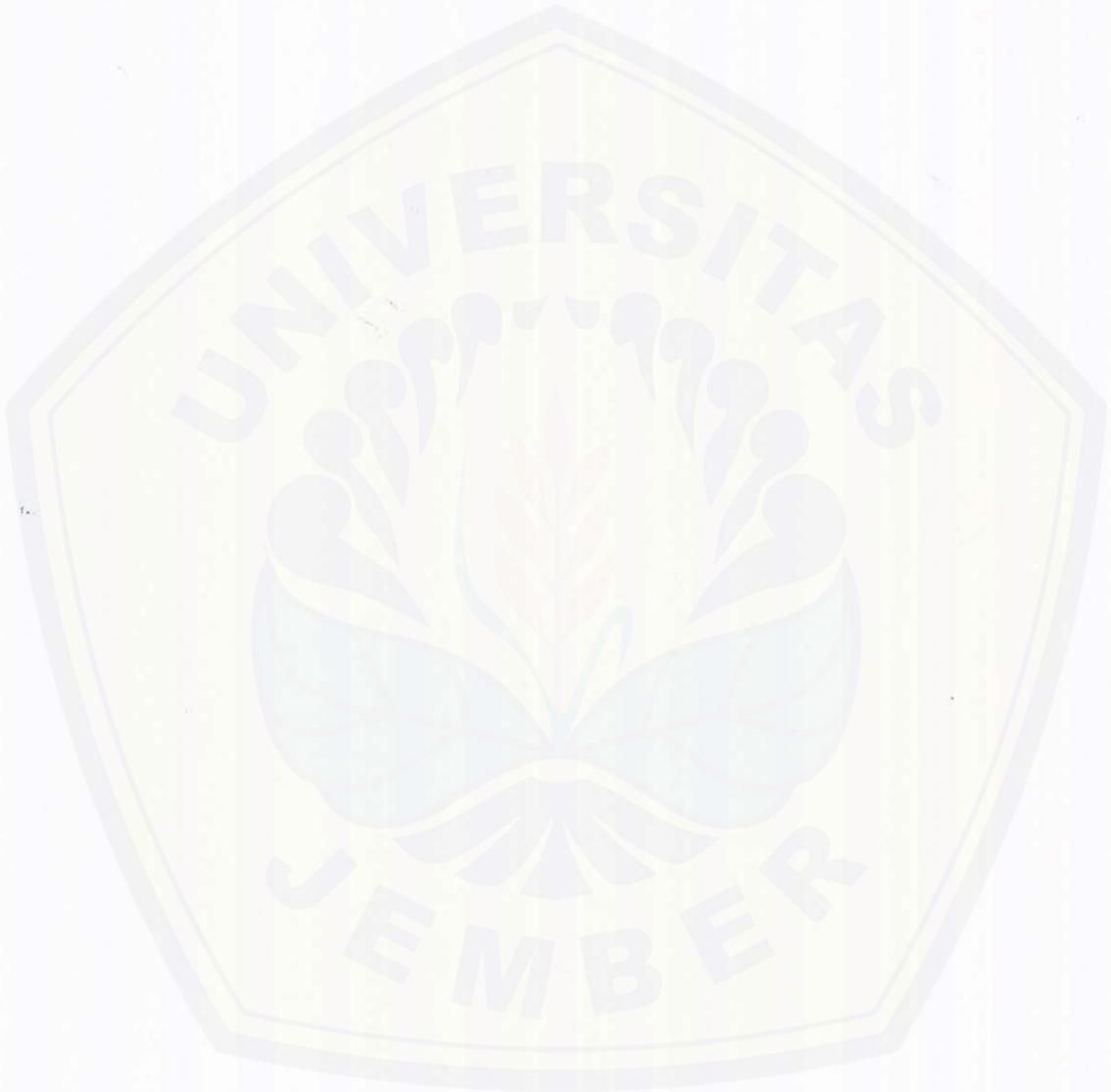
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN .....	3
1.2.1 Tujuan PKN .....	3
1.2.2 Kegunaan PKN .....	3
<b>II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Sejarah Singkat BRI Unit Gajah Mada .....	4
2.2 Struktur Organisasi .....	6
2.3 Personalia .....	12
2.4 Kegiatan Operasional BRI Unit Gajah Mada .....	12
<b>III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>16</b>
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	16
3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	16
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata .....	18
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan .....	30
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>32</b>
<b>Lampiran</b>	

DAFTAR TABEL

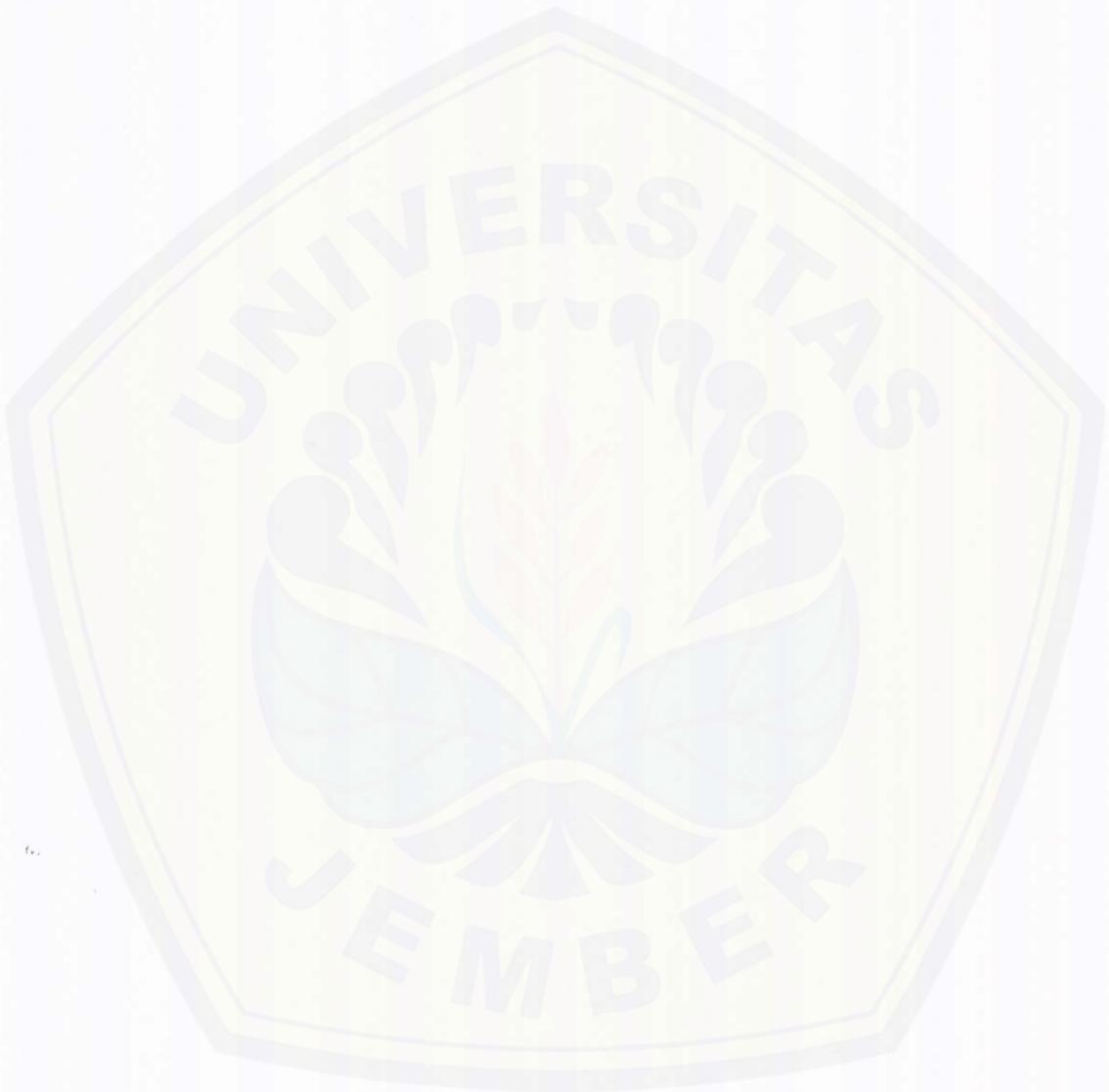
1. Daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) ..... Halaman 18
2. Daftar PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji bulan Maret 2002 ..... Halaman 29



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero )

Unit Gajah Mada ..... Halaman 7



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN )
2. Surat keteranga telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata ( PKN )
3. Daftar hadir kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN )
4. Bukti potong PPh pasal 21
5. Informasi kegiatan rekening Insentif Bendaharawan gaji
6. Informasi kegiatan rekening PPh Insentif Bendaharawan Gaji
7. Surat setoran pajak
8. Nota pelimpahan rekening Unit ke Kantor Cabang
9. Slip pembayaran Insentif Bendaharawan Gaji
10. Slip pemotangan PPh Insentif Bendaharawan Gaji atas rekening yang bersangkutan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Saat negara sedang dalam masa melaksanakan pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dibidang materiil maupun dibidang spirituil, sesuai dengan landasan pancasila dan undang – undang dasar 1945, maka perlu diperhatikan masalah pembiayaannya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri baik itu dari sektor migas maupun dari sektor nonmigas. Sektor migas sangat besar dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan negara dalam APBN, akan tetapi mengingat migas merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui yang keberadaannya semakin lama semakin berkurang sehingga dalam waktu panjang tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber utama penerimaan dalam APBN dan disamping itu sektor ini sangat rentan dengan fluktuasi harga di pasar internasional.

Orientasi pembiayaan pembangunan mulai berubah setelah adanya guncangan harga minyak pada tahun 1980 – an yang mengakibatkan penerimaan negara dari sektor migas mengalami penurunan secara drastis, sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber penerimaan untuk kelanjutan pembangunan nasional. Alternatif lain yang sangat potensial dalam hal ini adalah pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan semakin penting, disamping fungsinya sebagai sumber penerimaan bagi kas negara ( budgeter ), pajak juga memiliki fungsi mengatur ( reguleren ) terutama pada saat kondisi ekonomi nasional yang masih mencari jalan keluar dari krisis ekonomi dan moneter yang pemulihannya memerlukan waktu dan kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Hal ini seperti menggugah kembali kesadaran kita bahwa pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber dari dalam negri terutama dari sektor pajak merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi dimasa yang akan datang, agar kita bisa bersaing di kanca Internasional.

Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap sumber penerimaan negara dari sektor pajak mendapat peran yang cukup

signifikan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Porsi penerimaan negara dari sektor pajak dalam APBN dari tahun ke tahun semakin besar, hal ini adalah sebagai kosekuensi dari upaya mengurangi bantuan luar negeri dan meningkatkan penerimaan dalam negeri.

Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama adalah pertumbuhan ekonomi nasional dimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pemerintah melalui lembaga keuangan bank mengeluarkan kebijaksanaan umum perkreditan yang ditempuh sebagai bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan nasional yang yang pragmatis dan disesuaikan dengan perkembangan dan masalah pokok yang dihadapi perekonomian nasional. Pemerintah menerapkan program stabilitas ekonomi yang dikenal dengan sebutan politik uang ketat sebagai upaya mengatasi kenaikan harga -- harga dan menurunkan laju inflasi, selain itu dalam rangka menunjang pemertaan pembangunan dan membantu memperluas kesempatan kerja, pemerintah memperkenalkan program Kredit Investasi Kecil ( KIK ), Kredit Modal Kerja Permanen ( KMKP ), Kredit Usaha Tani ( KUT ), Kredit Umum Pedesaan ( Kupedes ) dan lain – lain yang ditujukan khusus untuk golongan ekonomi lemah.

Selain sebagai Agent Of Development, Bank juga sebagai badan usaha yang dalam kegiatan usahanya banyak berkaitan dengan bidang perpajakan misalnya, Bank yang dijunjuk sebagai bank persepsi akan menerima setoran pajak dari wajib pajak yang berada diwilayah operasinya, Bank sebagai badan usaha akan membayar gaji pada karyawannya dan sekaligus akan memotong pajak atas gaji yang dibayarkannya, Bank akan membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah dan atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat usahanya, Bank akan memotong pajak atas pembayaran yang dilakukan berhubungan dengan jasa dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi, dan melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak lainnya, serta akan membayar pajak atas laba yang diperoleh dari kegiatannya sebagai badan usaha. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis memilih judul “ *Mekanisme Pemotongan PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji dalam pemberian KUPeDES golongan berpenghasilan tetap pada BRI Unit Gajah Mada Jember* “.

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tentang PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji dalam pemberian Kupedes golongan berpenghasilan tetap pada BRI Unit Gajah Mada Jember.
2. Ingin memadukan antara pengetahuan teori yang didapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek yang sebenarnya tentang PPh Pasal 21 khususnya PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji dalam pemberian Kupedes golongan berpenghasilan tetap.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai PPh pasal 21 khususnya, PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji dalam pemberian Kupedes golongan berpenghasilan tetap.
2. Sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## II GAMBARAN UMUM LEMBAGA

### 2.1 Sejarah singkat BRI Unit Gajah Mada

Bank Rakyat Indonesia mula – mula didirikan berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1946, merupakan Bank pemerintah pertama yang didirikan sesudah kemerdekaan. Sebelumnya bank tersebut berturut – turut bernama Algemeene Volkscedietbank dan Syomin Ginko.

Dengan U.U. No.41 tahun 1960 didirikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang tugasnya menjalankan usaha perkreditan rakyat, khususnya menyelenggarakan perkreditan kepada koperasi, kaum tani dan nelayan.

Kemudian Bank Rakyat Indonesia, serta Bank Tani dan Nelayan dilebur kedalam Bank Tani dan Nelayan masing – masing berdasarkan U.U. No. 42 tahun 1960 dan U.U. No. 43 tahun 1960. Secara materiil, Bank Tani dan Nelayan hanya merupakan peleburan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tani dan Nelayan.

Dengan U.U. No. 44 tahun 1960, sebuah bank yang bernama Nederlandsche Handel Maatschappij yang didirikan pada tahun 1824 di nasionalisir dan kemudian dilebur pula kedalam Bank Tani dan Nelayan berdasarkan keputusan menteri keuangan No. 261206 / B.U.M / II / tanggal 30 Nopember 1960.

Setelah itu, berdasarkan ketetapan Presiden No. 9 tahun 1965 Bank Tani dan Nelayan ( ex. Peleburan Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani dan Nelayan dan Nederlandsche Handel Maatschappij ) dilebur kedalam Bank Indonesia, menjadi Bank Indonesia urusan Tani dan Nelayan. Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Presiden No. 17 tahun 1965, ex Bank Tani dan Nelayan ( Bank Indonesia Urusan Tani dan Nelayan ) dilebur kedalam bank tunggal yaitu Bank Negara Indonesia yang menjalankan usahanya dengan nama B.N.I. Unit II.

Sebelum BRI Unit desa berkembang. Yogyakarta telah dipilih sebagai daerah pilot proyek BRI Unit desa dalam rangka mencari perbaikan-perbaikan organisasi, yang didalamnya terdapat Sistem dan administrasi perkreditan guna meningkatkan produksidan pendapatan petani. Khususnya untuk mengatasi segala kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam penyaluran kredit Bimas.

Maka berdasarkan surat keputusan Direksi BRI Nokep : 8 – 34 – 31 / 9 / 1969 tanggal 8 September 1969 telah didirikan pilot proyek BRI Unit Desa sebanyak 18 buah di Yogyakarta yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 10 September 1969.

Dengan telah berhasilnya pilot proyek BRI Unit Desa tersebut dalam menyalurkan kredit Bimas yang disempurnakan maka didirikan BRI Unit Desa di daerah-daerah lainnya dipulau Jawa dan kemudian di beberapa daerah lain diluar Jawa.

Adapun mengenai dasar hukum didirikannya BRI Unit Desa adalah dengan menggunakan pijakan pada:

1. Inpres No 4 tahun 1973 tanggal 3 Mei 1973.
2. Ijin pembukaan BRI Unit adalah Keputusan Menteri Keuangan RI dengan Nokep 040 / DJM / III.3 / 2 / 1976. tanggal 5 Februari 1976.

BRI Unit Gajah Mada pada mulanya bernama BRI Unit desa yang terletak di daerah Gebang kabupaten Jember, yang berdiri pada tahun 1970. Sedangkan kegiatannya pada waktu itu hanya menangani program pemerintah dalam bimbingan masal. Khususnya dalam bidang pertanian yaitu padi dan palawija. Adapun kegiatannya dalam melayani nasabahnya dengan memberikan kredit yang meliputi:

1. Cost Of Living yaitu kredit yang diberikan untuk biaya hidup dalam bentuk uang tunai yang di pergunakan untuk pembiayaan lahannya.
2. Kredit untuk sarana produksi yaitu meruoakan penyediaan fasilitas kebutuhan pertanian yang meliputi pupuk urea, TSP, dan bibit serta obat-obatan dalam bentuk non tunai.

Sejak tahun 1973, sesuai dengan Inpres No 4 tahun 1973 tanggal 3 Mei 1973. Bimas Gebang dirubah namanya menjadi BRI Unit Desa Gebang, Dengan jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat juga berkembang.yang meliputi:

1. Kredit Bimas.
2. Kredit Mini, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat berkisar antara Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00.
3. Kredit Midi, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat berkisar antara Rp.. 200.000,00. sampai dengan Rp. 500.000,00.

Sejak deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang lebih dikenal dengan sebutan paket kebijaksanaan Juni 1983, maka bantuan likuiditas pemerintah terhadap BRI Unit Desa

sedang pada kenyataannya di wilayah pedesaan masih terdapat potensi dana yang belum terjangkau oleh BRI Unit Desa. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka pada awal tahun 1984 mulai diperkenalkan bentuk pinjaman kredit umum pedesaan yang lebih dikenal dengan sebutan KUPeDES. Untuk menunjang operasionalnya, BRI Unit Desa Gebang dilengkapi dengan kegiatan pelayanan giro dan deposito disamping Tabanas yang telah ada sejak dulu. Kemudian pada akhir tahun 1984 diperkenalkan lagi satu jenis simpanan baru yang disebut Simpedes atau simpanan pedesaan. Hal ini bertujuan agar BRI Unit Desa dapat menjadi satu sistem perbankan yang mampu berdiri sendiri dalam melaksanakan tugasnya, dan sejalan dengan perkembangan BRI Unit Desa maka pada tahun 1987 Kredit Bimas dihapus.

Pada tahun 1989 BRI Unit Desa Gebang dipindah lokasinya ke jalan Gajah Mada yang kemudian namanya diganti menjadi BRI Unit Gajah Mada, yang mulai Agustus 1992 secara resmi dirubah statusnya menjadi bentuk Perseroan Terbatas ( PT ), yang dituntut untuk bekerja lebih efisien. Namun demikian BRI Unit Gajah Mada sebagai Bank milik Negara, yang mempunyai fungsi sebagai Agent Of Development yang diwujudkan sebagai motor penggerak perekonomian di daerah pedesaan.

## 2.2 Struktur Organisasi

Organisasi adalah koordinasi yang rasional dari aktivitas sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan yang jelas. Melalui pembagian kerja dan fungsi kerja serta jenjang wewenang dan tanggung jawabnya, untuk organisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Unit Gajah Mada dilihat dari bagan organisasinya ialah berbentuk organisasi garis lurus, wewenang dari kepala unit yang membawahi atau mengalir langsung kepada karyawannya.

Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Unit Gajah Mada adalah sebagai berikut:



Gambar. I : Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Cabang Jember Unit Gajah Mada.

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Cabang Jember Unit Gajah Mada.

Adapun Job Description PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Unit Gajah Mada tersebut adalah sebagai berikut:

## A. Kepala Unit

### A.1. Tugas Pokok

- a. Memimpin kantor BRI Unit sesuai dengan tugas pokok ( penerimaan simpanan, pemberian pinjaman dan pelayanan jasa – jasa lainnya yang telah ditetapkan ) serta membina BRI Unit dalam rangka pelayanan unit pada masyarakat.
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BRI Unit.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan kerja para pegawai BRI Unit yang menjadi bawahannya.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme kontrol BRI Unit yang meliputi:
  - Pengurusan Kas
  - Administrasi Pembukuan
  - Register-register, berkas – berkas dan surat – surat berharga

- e. Memutuskan permintaan pinjaman, fiat bayar pinjaman atau simpanan, fiat bayar dan menandatangani surat – surat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- f. Mengadakan hubungan yang baik dan kerja sama dengan unit – unit organisasi BRI Unit serta dalam batas – batas kewenangan yang dimiliki.
- g. Memberikan bimbingan, membuat daftar penilaian karya dan prestasi kerja secara periodik serta usulan kenaikan pangkat bawahannya kepada Pincab.
- h. Melakukan pembinaan terhadap nasabah pinjaman maupun simpanan.
- i. Memperkenalkan dan memasarkan jasa – jasa perbankan pada masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka pengembangan usaha BRI Unit.
- j. Melaksanakan kontrol pemeliharaan/ penyediaan materiil termasuk gedung/ ruang kerja, perlengkapan dan peralatan kantor atau kesekretariatan lainnya.
- k. Mampu melaksanakan pekerjaan Mantri BRI Unit, Deskman dan teller serta menggantikan fungsinya bila yang bersangkutan berhalangan.
- l. Menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu – waktu.
- m. Menyampaikan laporan dan informasi kepada Pincab apabila terjadi penyimpangan dalam penerimaan / pemberian simpanan / pinjaman.
- n. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kemudian oleh kantor cabang.

## A.2 Tanggung jawab:

Ka-unit bertanggung jawab atas:

- a. Pencapaian sasaran atas rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Kelancaran tugas – tugas operasional, termasuk efisiensi dan tercapainya kepuasan nasabah.
- c. Tersedianya kas yang cukup di BRI Unit.
- d. Terpeliharanya mekanisme built in control ( waskat ) di BRI Unit .
- e. Ketertiban dan disiplin kerja serta ketrampilan pegawai BRI Unit yang dipimpinya.
- f. Memelihara BRI Unit dan BRI pada umumnya di mata masyarakat.
- g. Kelengkapan petunjuk – petunjuk kerja dan terselenggaranya kerja sama yang baik dengan instansi lainnya.

- h. Terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi BRI Unit.

## **B. Mantri**

### **B.1. Tugas Pokok:**

- a. Memeriksa permintaan pinjaman di tempat usaha nasabah yang meliputi usahanya, letak jaminan dan menganalisisnya serta mengusulkan putusan pinjaman kepada Ka – Unit.
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah pinjaman dan simpanan.
- c. Memperkenalkan dan memasarkan jasa – jasa bank kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berhubungan dengan BRI Unit .
- d. Melaksanakan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa di tempat usaha nasabah, menaggih dan mengusulkan langkah – langkah penanggulannya.
- e. Menyampaikan hasil kunjungan ke tempat nasabah pada Ka – Unit.
- f. Memelihara dan mengejakan rencana kerja, buku tourne dan buku eksploitasi kendaraan bermotor.
- g. Menyampaikan laporan kepada Ka - Unit apabila dijumpai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan operasional BRI Unit.
- h. Mengikuti kegiatan ekonomi wilayah kerjanya dan melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Ka – Unit selama tidak melanggar asas pengawasan.

### **B.2. Tanggung Jawab**

Mantri bertanggung jawab kepada Ka – Unit, atas:

- a. Kebenaran hasil pemeriksaan tempat nasabah yang meliputi kegiatan usahanya, letak jaminannya, analisa serta usulan putusan pinjaman.
- b. Ketetapan pemasukan angsuran pinjaman.
- c. Perkembangan dan kemajuan usaha pinjaman, simpanaan dan pelayanan jasa Bank lainnya di BRI Unit.
- d. Penguasaan data dan pemanfaatan situasi atau perkembangan perekonomian wilayah kerjanya guna kepentingan BRI Unit.

- e. Penguasaan data perkembangan usaha masing – masing nasabah.
- f. Memelihara citra BRI Unit dan BRI umumnya di mata masyarakat.
- g. Keberhasilan tugas – tugas lainnya yang diberikan Ka – Unit.

### **C. Deskman atau Pembuku**

#### **C.1. Tugas Pokok:**

- a. Melaksanakan posting semua transaksi yang terjadi di BRI Unit.
- b. Menata usahakan register – register simpanan dan pinjaman serta pemberantasan tunggakan dana yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman serta surat – surat berharga.
- c. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau kepada calon nasabah pinjaman, simpanan, dan jasa – jasa perbankan lainnya di BRI Unit dengan sebaik – baiknya.
- d. Mengelola berkas – berkas pinjaman dan simpanan.
- e. Mengerjakan semua laporan BRI Unit, kecuali laporan neraca dan rugi – laba.
- f. Membuat pro ofsheet Deskman, yang data – datanya diambil dari bukti kas pemindah bukuan.
- g. Membuat account yang datanya diambil dari kartu SL yang htelah di posting dan telah diperiksa Ka – Unit ( untuk BRI Unit manual ).
- h. Menatausahakan pengarsipan transaksi Teller, Pro ofsheet, RMBP, RMBB dan Account secara urut berdasarkan tanggal pembukuannya.
- i. Menatausahakan pengarsipan dari bukti – bukti pembukuan di dalam amplop yang telah ditentukan.

#### **C.2. Tanggung Jawab:**

Deskman atau pembuku bertanggung jawab langsung kepada Ka – Unit, atas :

- a. Ketertiban dan kebenaran setiap posting transaksi yang ada pada BRI Unit.
- b. Ketertiban dan keamanan penyimpanan berkas – berkas pinjaman dan simpanan, pengarsipan bukti – bukti kas dan pembukuan.
- c. Ketetapan dan kebenaran penyampaian data – data laporan.

- d. Kebenaran dan keterttiban administrasi pembukuan surat – surat berharga dan dokumen penting lainnya.
- e. Kelengkapan dan penyimpanan karttu, register, serta buku – buku lainnya yang berkaitan dengan adaministrasi pembukuan

## **D. Teller**

### **D.1. Tugas Pokok:**

- a. Bersama – sama Ka – Unit menyelenggarakan pengurusan kas BRI Unit.
- b. Menerima uang setoran dari nasabah dan memvalidasi dalam komputer.
- c. Membayarkan uang kepada nasabah yang berhak setelah ada fiat bayar dari yang berwenang dan telah divalidasi kepada komputer.
- d. Memfiat ( memberikan persetujuan bayar ) atas peangaambilan simpanan sebatas kewenangan yang dimiliki.
- e. Mencatat semua transaksi kas dan memvalidasi buku kas dalam komputer.
- f. Menyetorkan setiap ada kelebihan maksimum kas selama jam kerja dan menyetor sisa kas pada akhir hari ke kas induk.
- g. Membuat rekap mutasi bunga pinjaman ( RMBP ) yang angka – angkanya diambil dari bukti kas setoran pinjaman ( Bagi BRI Unit manual ) dan juga RMBB.
- h. Membuat Pro ofsheet teller dan pro ofsheet Ka – Unit.
- i. Mengerjakan adaministrasi kupon undian simpedes dan simaskot.

### **D.2. Tanggung Jawab:**

Teller bertanggung jawab kepada Ka – Unit atas:

- a. Pengurusan kas bersama Ka - Unit.
- b. Ketertiban adaministrasi logistik.
- c. Kelengkapan dan keamanan surat berharga.
- d. Terpeliharanya citra BRI Unit dan BRI pada umumnya di mata masyarakat.
- e. Kebenaran dan ketetapan waktu penyusunan neraca harian, laporan neraca dan laporan rugi – laba.

- f. Keamanan dan kecocokan uang kas yang berada di kasir maupun yang ada di brand kast.
- g. Kelancaran dan ketetapan pelayanan penerimaan setoran dan pembayaran ulang dari dan kepada nasabah.

### 2.3 Personalia

Dalam mengoperasikan aktifitas – aktifitasnya setiap hari BRI Unit Gajah Mada menggunakan delapan tenaga kerja yang terdiri dari 7 orang pegawai tetap dan 1 orang tenaga bantu ( penjaga malam )

Dalam menjalankan aktifitasnya menurut jadwal yang telah ditetapkan oleh BRI Unit Gajah Mada terdiri dari jam kerja dan jam kas serta jam istirahat, yaitu:

a. jam kerja	: senin – jumat,	07. 45 – 16. 45
istirahat	: senin – kamis,	12. 30 – 13. 30
	jumat,	11. 30 – 13. 00
b. jam kas	: senin – jumat,	08. 00 – 12. 30
		13. 30 – 15. 00

### 2.4 Kegiatan Operasional BRI Unit Gajah Mada

Untuk mencapai tujuan pengembangan BRI Unit Gajah Mada cabang Jember, maka diadakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, maka BRI Unit Gajah Mada cabang Jember melakukan kegiatan sebagai berikut:

#### a. Simpanan

Dalam rangka mengefektifkan usaha mobilisasi dana dari masyarakat, BRI Unit Gajah Mada secara efektif menawarkan berbagai macam instrumen simpanan yang ada. Didalam menawarkan jasa – jasa Bank tersebut maka perlu adanya promosi yang digunakan untuk memperkenalkan jenis – jenis simpanan yang dapat dilayani BRI Unit Gajah Mada cabang Jenber. Adapun simpanan yang ada tersebut adalah :

sepanjang saldo mencukupi. Simpedes dapat dijadikan sebagai jaminan atas segala jenis kredit yang ada di BRI Unit Gajah Mada serta adanya undian berhadiah yang diadakan setiap 6 ( enam ) bulan sekali yang diselenggarakan oleh setiap BRI Unit.

## 2). TABANAS BRI

Atau Tabungan Pembangunan Nasional BRI, adalah : bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu, dengan syarat – syarat tertentu penyetoran dan pengambilannya. TABANAS BRI dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia No. se: S – 161 – DIR / DJS / 11 / 1989 tanggal 29 November 1989. TABANAS BRI dapat dijadikan sebagai jaminan kredit di BRI Unit Gajah Mada Jember, serta berhadiah.

## 3). DEPOBRI

Adalah simpanan uang dari pihak ketiga atau masyarakat kepada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut surat perjanjian antara pihak ketiga atau masyarakat dengan Bank yang bersangkutan.

## 4). GIRO

Adalah simpanan dari masyarakat pada BRI Unit Desa yang setorannya maupun penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan tidak dibatasi jumlah maupun frekwensinya sepanjang dananya mencukupi. Pengambilannya dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro. Dan penyetorannya dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi pengambilannya hanya dapat dilakukan oleh pemegang rekening yang bersangkutan.

## 5). SETORAN ONH BRI

Sebagai sarana untuk menampung niat dari umat Islam yang akan melaksanakan ibadah Haji. Dengan ONH BRI akan ada jaminan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kecelakaan.

#### 6). CEPEBRI

Cek perjalanan Bank Rakyat Indonesia berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang praktis dan paling aman dibawa dalam perjalanan.

#### 7). SIMSKOT

Sama dengan Simpedes hanya berbeda pada awal setorannya.

### **b. Jasa BRI Unit Gajah Mada Lainnya :**

#### 1). TRANSFER

Adalah perintah pengiriman uang dari nasabah kepada KANCA / BRI Unit kepada sipenerima.

Jenis Transfer antar lain:

##### a). Transfer keluar atau Transfer kirim:

Pengiriman perintah dari KANCA / BRI Unit penerima untuk membayar sejumlah uang tertentu.

##### b). Transfer masuk atau Transfer terima :

Perintah yang diterima dari KANCA / BRI Unit penerima untuk membayar sejumlah uang kepada penerima.

#### 2). KLIRING

Adalah penyelesaian tagihan warkat – warkat kliring antara lain: Bilyet Giro, Cek, Wesel, dan lain – lain antar Bank yang masuk anggota kliring.

#### 3). INKASO

Adalah penagihan suatu piutang oleh suatu pihak yang bertindak untuk dan atas nama seseorang yang berpiutang kepada seseorang yang berhutang kepadanya atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga, misalnya: Cek, Wesel, dan sebagainya.

### **c. Titipan – titipan**

**c. Titipan – titipan**

Adalah setoran dari pihak ketiga pada Bank Rakyat Indonesia yang tidak berbunga dan penyeteroran serta pengambilannya dapat dilakukan sewaktu – waktu.

Jenis titipan yang dilayani di BRI Unit Gajah Mada adalah:

- 1). Penerimaan setoran PBB
- 2). Penerimaan setoran iuran Televisi
- 3). Penerimaan setoran SPP Yayasan “ MANDALA “.

**d. Pinjaman**

Kupedes ( Kredit Umum Pedesaan ) adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh BRI Unit Gajah Mada untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak untuk dibiayai. Adapun sasaran Kupedes adalah:

- 1). Golongan Pengusaha
- 2). Golongan Berpenghasilan Tetap

Jenis – jenis Kupedes ditinjau dari tujuan penggunaannya, yaitu :

- 1). Kupedes Modal Kerja

Fasilitas Kupedes Ini diberikan pada pengusaha sebagai tambahan modal kerja usahanya atau untuk keperluan konsumtif bagi pegawai.

- 2). Kupedes Investasi

Fasilitas Kupedes ini diberikan pada pengusaha untuk pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana / peralatan produksi.

Sedangkan golongan berpenghasilan tetap, kredit tersebut dapat digunakan untuk pembelian, pembangunan, atau perbaikan rumah.

Sedangkan sektor yang dibiayai adalah sebagai berikut:

- a). Sektor Pertanian
- b). Sektor Perindustrian
- c). Sektor Jasa
- d). Sektor Perdagangan
- e). Sektor Berpenghasilan Tetap

### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ( PKN ) dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya ( A. Md ) khususnya dibidang perpajakan, oleh sebab itu setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan PKN. Sebelum melaksanakan PKN, setiap mahasiswa diberikan pengarahan oleh ketua program studi mengenai prosedur pelaksanaan dan obyek PKN. Setiap mahasiswa dapat melaksanakan PKN apabila sudah menyelesaikan minimal 100 sks dan pelaksanaan PKN baru dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memprogram PKN dalam Kartu Rencana Studi ( KRS ).

Sebelum melaksanakan PKN, setiap mahasiswa diharuskan untuk membuat proposal yang ditujukan kepada perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa latar belakang, tujuan dan kegunaan PKN. Apabila perusahaan, BUMN atau BUMD tidak memerlukan proposal maka mahasiswa tidak perlu untuk membuat proposal. Mahasiswa harus meminta surat pengantar kepada bagian akademik untuk diserahkan kepada perusahaan, BUMN atau BUMD. Setelah mendapatkan surat balasan tentang diterimanya untuk melaksanakan PKN ditempat sebagaimana dimaksudkan dalam proposal ataupun surat pengantar, kemudian bagian akademik akan membuatka sutar tugas bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk pelaksaan PKN.

#### 3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN ).

##### a. Tempat Praktek Kerja Nyata ( PKN )

Program Praktek Kerja Nyata ( PKN ) dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) Cabang Jember Unit Gajah Mada yang terletak di Jl. Gajah Mada no. 39 Jember.

##### b. Waktu Praktek Kerja Nyata ( PKN )

Program Praktek Kerja Nyata ( PKN ) dilaksanakan selama dua belas hari kerja mulai hari senin tanggal 18 Maret 2002 sampai dengan hari rabu tanggal 3 April 2002

**c. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN )**

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Minggu pertama, diadakan pembukaan Praktek Kerja Nyata Praktek Kerja Nyata ( PKN ) di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Cabang Jember Unit Gajah Mada. Penulis mulai mengetahui tempat PKN dan mulai diperkenalkan dengan para staf dan karyawan di kantor BRI Unit Gajah Mada. Penulis ditempatkan pada bagian Deksman.
- 2) Minggu ke dua, Penulis mulai bertanya mengenai pajak – pajak yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Cabang Jember Unit Gajah Mada dan penulis mulai diterjunkan langsung untuk menangani masalah pajak khususnya pajak atas Insentif Bendaharawan Gaji. Pada minggu ini penulis mulai memilih judul untuk laporan dan mencari data – data yang diperlukan.
- 3) Minggu ke tiga, penulis mulai mengajukan judul dan telah mendapatkan dosen pembimbing sehingga bisa berkonsultasi mengenai laporan yang akan dibuat, serta diadakan penutupan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) sekaligus perpisahan dengan para staf dan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia ( PERSERO ) Cabang Jember Unit Gajah Mada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel daftar kegiatan Praktek Kerja Nyata ( PKN )berikut ini :

Tabel 1. Daftar kegiatan Praktek Kerja Lapangan ( PKN )

No	Jenis Kegiatan	Minggu		
		I	II	III
1.	Pembukaan PKN di Kantor PT. BRI Cabang Jember Unit Gajah Mada.			
2.	Perkenalan Tempat pelaksanaan PKN ( ditempatkan pada bagian Deskman ) dan obyek PKN.	X		
3.	Perkenalan dengan para staf dan karyawan PT. BRI Cabang Jember Unit Gajah Mada.	X		
1.	Mengetahui jenis – jenis pajak yang ada pada PT. BRI Unit Gajah Mada.		X	
2.	Mulai memilih judul dan mencari data – data yang diperlukan.		X	
1	Mengajukan judul yang dipilih dan kemudian mendapatkan Dosen Pembimbing.			X
2	Penutupan PKN dan perpisahan dengan para staf dan karyawan PT. BRI Cabang Jember Unit gajah Mada.			X

Sumber data : Data diolah

### 3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata ( PKN )

#### a. Pengertian Pajak Penghasilan ( PPh ) secara umum

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara dimana pajak sangat sangat berperan penting dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri.

Pajak penghasilan adalah merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 merupakan PPh yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi tersebut boleh tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

### **1). Pemotong Pajak**

Yang bertindak sebagai pemotong atas Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 yang selanjutnya disingkat “ Pemotong Pajak “ adalah :

- a). Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap ( BUT ), badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan maupun unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

- b). Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Instansi atau Lembaga pemerintah, Lembaga – Lembaga lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan.
- c). Dana Pensiun, PT. Astek, PT. Jamsostek, serta badan – badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan HariTua atau Tunjangan Hari Tua ( THT ).
- d). Perusahaan, badan, BUT, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta dengan nama dan bentuk apapun dan badan atau organisasi internasional yang melakukan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak ( WP ) dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
- e). Perusahaan, badan, BUT, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta dengan nama dan bentuk apapun dan badan atau organisasi internasional yang melakukan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan statu WP luar negeri.
- f). Yayasan (bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga dan kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi.

- g). Perusahaan, badan, BUT, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun dan badan atau organisasi internasional yang melakukan pembayaran honorarium atau imbalan lain kepada peserta pelatihan dan pemagangan.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai pemotong PPh Pasal 21 adalah :

- a). Badan Perwakilan Negara Asing.
- b). Organisasi Internasional yang dikecualikan sebagai pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, misalnya: IMF, ILO dan lain – lain.

## 2). Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a). Pegawai, adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pekerjaan dalam jabatan negara atau BUMN dan BUMD.
- b). Penerima Pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, THT.
- c). Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- d). Penerima Upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, mingguan, borongan atau satuan.
- e). Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak.

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a). Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau Pejabat lain dari negara asing, dan orang – orang yang diperbantukan pada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
- b). Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan ( Kep Men No. 611 / KMK. 04 / 1994 Tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 314 / KMK. 04 / 1998 Tanggal 15 Juni 1998 ), sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

### 3). Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, antara lain:

- a). Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium ( termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas ), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- b). Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh secara tidak teratur berupa jasa prudukasi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan,

dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

- c). Upah harian, upah minnguan, upah satuan dan upah borongan.
- d). Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran sejenis lainnya, kecuali uang THT yang dibayarkan oleh PT. Taspen atau PT. Asabri.
- e). Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh WP dalam negeri, yang terdiri dari:
  - ( 1 ). Tenaga ahli yang terdiri dari : Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris.
  - ( 2 ). Pemain musik, Pembawa acara, Penyanyi, Pelawak, Bintang film, Sutradara, Crew film, Foto model, Peragawan / peragawati, Pemain drama, Penari, Pemahat, Pelukis, dan seniman lainnya.
  - ( 3 ). Olah ragawan.
  - ( 4 ). Penasehat, Pengajar, Pelatih, Penceramah dan moderator.
  - ( 5 ). Pengarang, Peneliti dan Penterjemah.
  - ( 6 ). Pemberi jasa dalam bidang tehnik, komputer, dan sistim aplikasinya, telekomonikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
  - ( 7 ). Kolportir iklan.
  - ( 8 ). Pengawas, Pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, Peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
  - ( 9 ). Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
  - ( 10 ). Peserta perlombaan.
  - ( 11 ). Petugas penjaja barang dagangan.
  - ( 12 ). Petugas dinas luar asuransi.

( 13 ). Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

- f). Gaji, gaji kehormatan, tunjangan – tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan – tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak – anaknya.
- g). Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yangt diberikan oleh bukan WP. -

Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a). Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b). Pembayaran THT dari PT. Taspen atau PT. Asbri kepada para pensiunan yang berhak untuk menerimanya.
- c). Uang tebesan pensiun yang dibayarkan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, THT yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggarajaminan sosial tenaga kerja yang jumlah brutonya Rp. 25.000.000,00 atau kurang
- d). Uang pesangon yang jumlah brutonya Rp 25.000.000,00 atau kurang.
- e). Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.
- f). Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
- g). Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
- h). Kenikmatan yang berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

i) Pembayaran yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II / d kebawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah berupa honorarium, uang sidang, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya selain penghasilan berupa penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

j). Penghasilan yang tidak melebihi Upah Minimum Regional (UMR).

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan bersifat final adalah:

- a). Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan THT yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja.
- b). Uang pesangon.
- c). Hadiah dan penghargaan perlombaan.
- d). Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
- e). Pembayaran yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II / d kebawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah berupa honorarium, uang sidang, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

**b. Dasar hukum pemotongan PPh atas insentif bendaharawan Gaji.**

Peraturan – peraturan tentang pajak penghasilan atas Insentif Bendaharawan gaji adalah sebagai berikut :

- 1). Undang – Undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Undang – Undang No 17 Tahun 2002
- 2). Dalam keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 636 / KMK.04 / 1994, pasal 2 ayat 2 tanggal 29 Desember 1994, tentang Pengenaan pajak penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuanan daerah.
- 3). Keputusan Direktrur Jendral Pajak No. –02 / PJ / 1995 Tanggal 9 Januari 1995 sebagai mana dirubah terakhir kali dengan Keputusan Direktrur Jendral Pajak No. 235 / PJ / 1999, Tangga 17 September 1999 tentang, petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
- 4). Surat Edaran dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) nose : B. 268. MKP / KPP / 08 / 2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai pengganti surat edaran nose : S. 79 – DIR / BUD / 11 / 1995 tanggal 16 November 1995 dan surat edaran nose : S. 09 – DIR / BUD / 02 / 1996 tanggal 22 Pebruari 1996 tentang, PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji dalam pemberian Kepedes golongan berpenghasilan tetap.

**c. Mekanisme pemotongan PPH atas insentif Bendaharawan Gaji.**

Kupedes adalah suatu fasilitas kredit pada BRI Unit yang diberikan kepada golongan pengusaha dan golongan berpenghasilan tetap dengan tujuan untuk membiayai keperluan investasi maupun penambahan modal kerja dalam rangka peningkatan usaha semua disektor ekonomi pedesaan, selain itu kupedes diharapkan dapat mengurangi ruang gerak rentenir atau lintah darat.

Dalam pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, biasanya dilakukan secara kolektif yang dilakukan oleh Bendaharawan gaji di instansinya, yaitu dengan cara memotong gaji penerima kupedes sebesar jumlah angsuran yang dibayar. Atas jasa yang dilakukan oleh Bendaharawan gaji sebagai pemotong gaji para pegawai di instansinya untuk angsuran kupedes maka sesuai dengan Surat Edaran Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) NOSE : S. 79 – DIR / BUD / XI / 1995 tanggal 16 November 1995 pihak bank memberikan imbalan suhubungan dengan jasa / kegiatan yang dilakukan oleh Bendaharawan gaji sebagai pemotonga gaji para pegawai untuk angsuran kupedes golongan berpenghasilan tetap yang lebih dikenal dengan sebutan Insentif Bendaharawan Gaji.

Atas insentif yang diterima oleh Bendaharawan gaji adalah merupakan penghasilan baginya dan akan dipotong pajak penghasilan oleh BRI Unit yang bertindak sebagai pemberi penghasilan.

Besarnya pajak yang dikenakan pada setiap pembayaran insentif dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yaitu berdasarkan insentif yang diterima oleh wajib pajak setiap bulan adalah sebagai berikut :

- 5% X sampai dengan Rp. 25.000.000
- 10% X diatas Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000
- 15% X diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000
- 25% X diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000
- 35% X diatas Rp. 200.000.000

Contoh Penghitungan PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji :

Sumaryono adalah Bendaharawan Gaji pada MTs Negeri II Jember yang setiap bulannya melakukan pembayaran gaji dan juga melakukan pemotongan

gaji atas karyawan yang menerima Kupedes di instansinya guna untuk membayar angsuran secara kolektif, yang mana pada bulan Maret melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 298.800,00 kepada BRI Unit Gajah Mada.

Jawab :

Jumlah angsuran yang dibayar	: Rp. 298.800,00
Insentif yang diterima	: 1,5 % X Rp. 298.800,00 Rp. 4.482,00
PPh yang harus dipotong	: 5 % X Rp. 4.482,00 Rp. 224,00

Dalam pemotongan pajak, BRI Unit melakukannya dengan menggunakan Form model KP PPh 3-6 sebagai bukti pemotongan pajak yang dilakukan setiap saat pembayaran Insentif kepada Bendaharawan Gaji. Setiap pemotongan yang dilakukan oleh BRI Unit ditampung dalam satu rekening. Untuk penampungan penerimaan potongan / setoran pajak atas Insentif kepada Bendaharawan yang memotong gaji untuk pembayaran angsuran Kupedes, menggunakan nomer rekening 33 - 01 - 1001, dengan jurnal pembukuan pembayaran Insentif Bendaharawan gaji, sebagai berikut :

1 ). Saat pembayaran.

D. 87 - 03 - 0001 : Biaya Insentif Bendaharawan Gaji	= 100%
K. 32 - 01 - 1001 : Titipan setoran pajak	= 10%
K. 33 - xx - xxxx : Rekening bendaharawan penerima Insentif	= 90%

2 ). Pelimpahan PPh ke Kantor Cabang.

D. 33 - 01 - 1001 : Titipan setoran pajak	= 10%
K. 49 - 30 - xxxx : Hubungan Pembukuan Unit - Kanca	= 10%

Yang pelimpahannya ke Kantor Cabang dilakukan paling lambat bersama dengan pelimpahan PPh pasal 21 gaji pegawai BRI Unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pemotongan PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji selama bulan Maret 2002 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji bulam Maret 2002

No	Tanggal	NAMA	INSTANSI	Penerima Kупedes	Jumlah Setoran	Insentif	Pajak
1	4/03/2002	Bambang. W	PLN	6 orang	3.202.600	48.039	2.402
2	5/03/2002	Habib Salim	Dinas Kependudukan	1 orang	430.200	6.453	323
3	5/03/2002	Moh. Zahroni	Dinas Pariwisata	8 orang	2.796.200	41.943	2.097
4	7/03/2002	Budi Hartono	Brigif 9	278 orang	97.002.000	1.455.030	72.752
5	11/03/2002	Mincuk. B	DPU	38 orang	11.809.100	177.136	8.857
6	13/03/2002	Rahmat Utomo	Bapas	3 orang	947.700	14.215	711
7	13/03/2002	Ishari	KP3N	6 orang	1.864.200	27.963	1.398
8	14/03/2002	Slamet	DLLAJR	12 orang	4.322.500	64.838	3.242
9	21/03/2002	Sumaryono	MTsN II Jember	1 orang	298.800	4.482	224
10	21/03/2002	Sugiati	BPS	16 orang	5.747.000	86.205	4.310
11	27/03/2002	Yudi Kriswanto	DISBUN	23 orang	7.767.500	116.513	5.826
12	27/03/2002	Juani Kamarudin	ASKES	2 orang	525.800	7.887	394
13	27/03/2002	Mulyono	PDAM	11 orang	1.473.200	22.098	1.105
14	27/03/2002	Titah Candrarini	MKA Mandiri	2 orang	250.400	3.756	188
15	27/03/2002	Sofia. J	Bank Danamon	4 orang	1.496.000	22.194	1.110
16	27/03/2002	Nur Achmadi	PTP. Zeelandia	3 orang	417.200	6.258	313
17	28/03/2002	Sri Rahajeng	PTP. Mumbul	28 orang	3.846.800	57.702	2.885
JUMLAH				442 orang	144.199.200	2.162.712	108.137

Sumber Data : Informasi kegiatan rekening BRI Unit Gajah Mada Jember

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa PPh yang dipotong atas pemberian Insentif sebesar Rp. 2.162.712,00 kepada 17 Bendaharawan Gaji dalam pemberian Kupedes Pada BRI Unit Gajah Mada Jember selama bulan Maret 2002 adalah sebesar Rp. 108.137,00, yaitu merupaka PPh yang dipotong atas Bendaharawan yang melakukan angsuran secara kolektif untuk 442 orang pegawai penerima Kupedes yang jumlah angsurannya pada bulan Maret 2002 mencapai Rp. 144.199.200,00

### 3.2 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ( PKN )

PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang memiliki tugas sebagai *agent of devalopment* yaitu, turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan dan meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selain itu juga merupakan badan usaha yang tidak terlepas dari motifasinya untuk memperoleh keuntungan yan sebesar – besarnya. Salah satu keuntungan perusahaan ini diperoleh dari selisih pendapatan bunga simpanan dan pinjaman serta dari kegiatan jasa Bank lainnya.

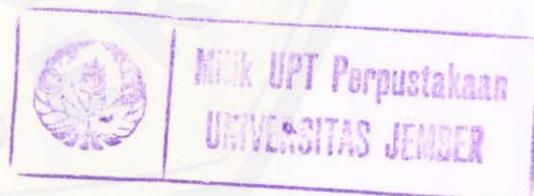
PT. Bank Rakyat Indonesia ( persero ) selain sebagai Wajib Pajak juga bertindak sebagai pemungut dan pemotong pajak. Untuk itu Bank Rakyat Indonesia harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Bank Rakyat Indonesia Unit Gajah Mada yang merupakan anak perusahaa dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya sebatas melakukan penghitungan, pemungnutan dan pemotangan atas pajak yang ada di BRI Unit, dan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor Cabang. Sebagi sarana untuk pelimpahan ke Kantor Cabang BRI Unit menggunakan bukti pemotongan, surat setotan pajak, dan nota pelimpahan Unit ke Kantor Cabang.

#### IV PENUTUP

Dengan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Dan tak lupa pula penulis juga mengucapkan terma kasih kepada para staf, karyawan dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta kepada kantor PT. BankRakyat Indonesia ( persero ) Unit Gajah-Mada Cabang Jember yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata ( PKN ). Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih teman – teman dan kerabat yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang penulis tidak dapat mentebutkan satu persatu, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya ( A. Md ) Perpajakan Program Studi Diplom III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan laporan ini banyak sekali terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan penulisan laporan ini. Penuis juga berharap agar penulisan laporan ini bermanfaat bagi penulis ataupun bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Dawam. M.R, 1995, *Bank Dalam Kilasan Sejarah*. Jakarta: LP3ES

Divisi Pendidikan dan Pelatihan. 2000 *Dana dan Jasa Bank*. Jakarta: PT. Bank Rakyat Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 636 / KMK.04 / 1994, pasal 2, ayat 2 tanggal 29 Desember 1994, tentang Pengenaan pajak penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : - 02 / PJ / 1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana dirubah terakhir kali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 235 / PJ / 1999 tanggal 17 September 1999 tentang, Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Mardiasmo, 1996, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI Ofset.

Pedoman Kerja BRI Unit bidang organisasi 1992.

Surat Edaran dari Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) nose : B. 268 MKP / KPP / 08 / 2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai pengganti surat edaran nose : S. 79 – DIR / BUD / 11 / 1995 tanggal 16 Nopember 1995 dan surat edaran nose : S. 09 – DIR / BUD / 02 / 1996 tanggal 12 Pebruari 1996 tantang, PPh atas Insentif Bendaharawan Gaji dalam pemberian Kupedes golongan berpenghasilan tetap.

Suyatno, Thomas, 1999, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan.

Universitas Jember, 1998, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.

Waluyo dan Wirawan. B. Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.



Nomor Rekening 32-01-1001	Nomor Rekening 49-30-0001
DARI → Pajak Pendapatan Benda-hara Instansi	KEPADA → Hub. Unit Kerja
Nomor Buku Besar 32-01-40	Nomor Buku Besar 49-30-40

NOTA DEBIT

NOTA KREDIT

URAIAN	JUMLAH
Pelimpahan Pajak Pendapatan Benda-hara Dln Maret 2002	
32-01-1001 01-04-2002 08:41 4.00179 108.137.00 D 322-R-ILR 1 49-021-001	
49-30-0001 01-04-2002 08:41 3.00180 108.137.00 K 322-R-ILR 1 49-021-001	Rp. ----108.137----
<b>JUMLAH</b>	Rp. ----108.137----

BERILANG

---Seratus Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah---

Jumlah Tersebut Diatas Telah Dikreditkan Dalam Rekening Saudara Didebetkan

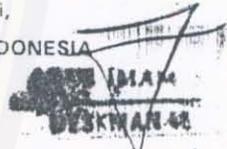
Jember 01-04-2002

20

Hormat Kami,

BANK RAKYAT INDONESIA

LEMBARAN UNTUK NASABAH



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)**

UD-1-B

Unit Gajah Mada (21)  
No. ....

Jember 01-04-2002

No. : 153 / 02/B

Lamp. :

Kepada  
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Kantor Cabang Jember  
di —  
Jember

### NOTA

Kami bukukan atas Rekening Kanca di PT. BRI (Persero) Unit Gajah Mada (21)

DEBET	KETERANGAN	KREDIT
	Pelimpahan: Pajak Pen dapatan Bendahara Gaji Bln Maret 2002	Rp. ---108.137---
(Seratus Delapan Ribu Seratus Tiga		Duluhi Bujur Rp)
	<b>Jumlah</b>	Rp. ---108.137---

Catatan/Tindakan :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

Jember /Unit Gajah Mada

  
**IMAM M  
BESKMAN**

KEPADA

Rekening

32-21-2763

~~SUMAR JORO~~

32-01-1001

PPH fee Bendahara  
Gaji!

Buku Besar

NOTA DEBIT

URAIAN

JUMLAH

PPH fee Bendahara Gaji  
MITSU A Jember  
15% x 5% x 298.800

Rp. 224

32-21-2763 27-03-2002 10:54 4.00134  
32-01-1001 27-03-2002 10:54 3.00135

224.000  
224.000

JUMLAH Rp. 224,-

LANG

4 dan ke atas per bulan

Jumlah Tersebut Diatas Telah Didebetkan Dalam Rekening Saudara

NO	NOGGAL	NOMOR	JUMLAH	PARAF
		DEBIT		

Hormat Kami

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

MUCH SHOLEH

NPWP : 8026545274

MUCH SHOLEH



K E P A D A



Nomor Rekening: 87-02-001 fee/insentif Bendahara  
 Nomor Buku Besar: 93-21-2763 Sumarsono

NOTA DEBET

URAIAN	JUMLAH
fee. bendahara MTS H II Jember 1,5% x Rp. 298.800 =	Rp. 4.482,-

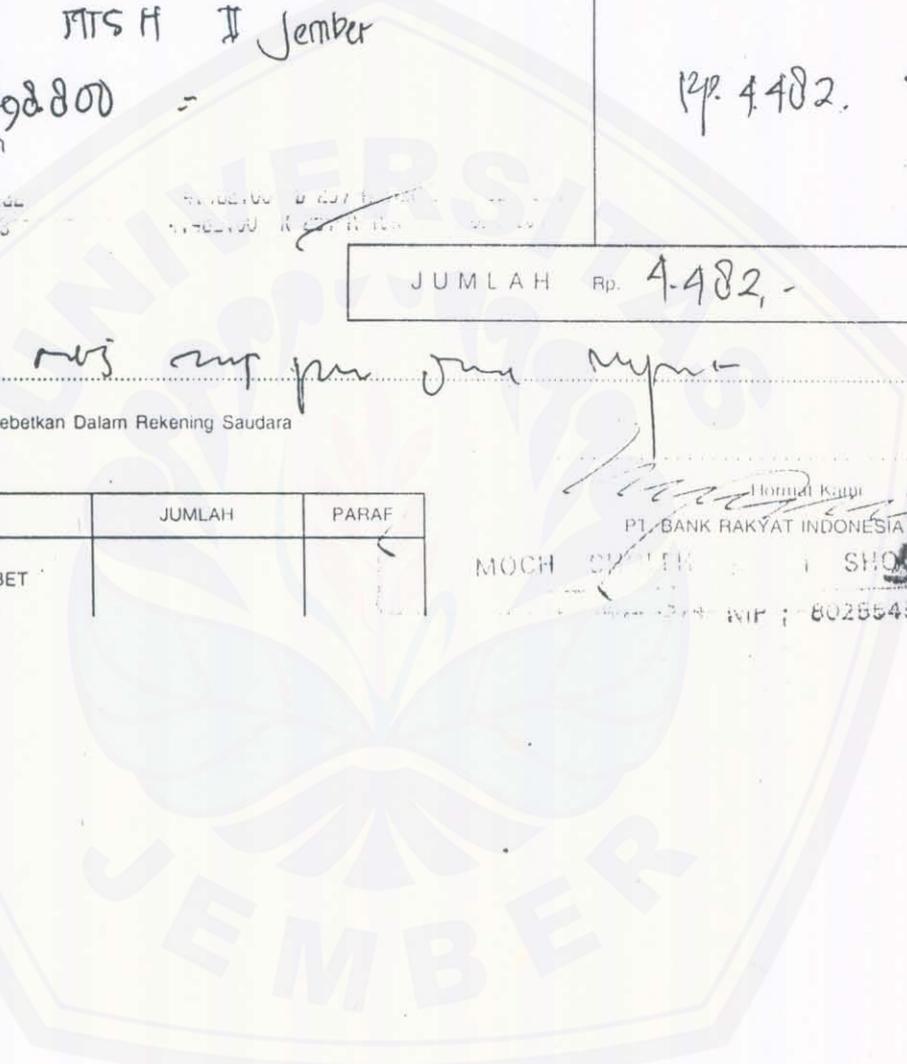
JUMLAH Rp. 4.482,-

BILANG

Jumlah Tersebut Diatas Telah Didebetkan Dalam Rekening Saudara  
 H. Supri M.S. Supri

TANGGAL	NOMOR	JUMLAH	PARAF
		DEBET	

Moch. Supri  
 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)  
 NIP : 802554527





SRI LUNI  
KAMPUS JEMBER K-121-001

INFORMASI KEGIATAN KEKENDI  
Pembaca Buku 11

1340131

01-04-2002

Korek : 87-03-002

Nama : FEL / INSANIT BENDA

Alamat : PEMOYONG BAJI

Lampail Sampai

Debet

Kredit

Saldo

Keterangan

04-03-20024.00450	48.039.00	0.00	48.039.00
05-03-20024.00309	6.453.00	0.00	4.548.406.00 d 33221941
05-03-20024.00313	41.743.00	0.00	4.390.849.00 d 33221512
07-03-20024.00295	1.450.030.00	0.00	1.045.079.00 d 33221640
11-03-20024.00530	177.136.00	0.00	6.822.519.00 d 33223097
13-03-20024.00180	14.215.00	0.00	6.036.730.00 d 33221103
15-03-20024.00180	27.763.00	0.00	6.064.893.00 d 33220707
14-03-20024.00267	64.000.00	0.00	6.129.501.00 d 33221870
21-03-20024.00150	4.002.00	0.00	6.154.013.00 d 33212700
21-03-20024.00150	86.205.00	0.00	6.220.238.00 d 33210309
07-03-20024.00120	116.013.00	0.00	6.336.731.00 d 33220971
07-03-20024.00170	7.887.00	0.00	6.349.010.00 d 33220008
07-03-20024.00131	22.098.00	0.00	6.366.716.00 d 33219042
07-03-20024.00170	3.716.00	0.00	6.370.472.00 d 33220891
07-03-20024.00180	22.174.00	0.00	6.392.656.00 d 33217400
07-03-20024.00180	6.250.00	0.00	6.398.929.00 d 33220732
09-03-20024.00230	57.702.00	0.00	6.456.626.00 d 33218151

SRI LUNI : WALAHARA

KAMIT

Pembaca Buku 11

MOCH SHOLEH

(ASUS IMAN N.)

REKOR LEMBAR TRANSAKSI  
KEMERDIAAN KEMERDIAAN KEMERDIAAN

01-04-2802 13:44:56

INFORMASI KEGIATAN KEHENDAK  
Pemerintah RI

Nopek : 32-01-1001 Alamat : MRI UNLI (GADAH BAHU) JBR

laporan Kredit Saldo Keterangan

No	Saldo	Debet	Kredit	Saldo	Keterangan
01-03-20024,00235	102,305,00	0,00	0,00	0,00	693000001
04-03-20023,00441	0,00	0,00	2,402,00	-402,00	33-22-1329
05-03-20023,00312	0,00	0,00	323,00	-725,00	33-22-1001
06-03-20023,00316	0,00	0,00	2,097,00	-022,00	33-22-1332
07-03-20023,00248	0,00	0,00	72,752,00	179,00	33-22-1000
11-03-20023,00039	0,00	0,00	0,00	-451,00	33-22-0307
13-03-20023,00107	0,00	0,00	711,00	-102,00	33-22-1163
13-03-20023,00191	0,00	0,00	1,398,00	-240,00	33-22-0767
14-03-20023,00270	0,00	0,00	3,242,00	-702,00	33-22-1376
21-03-20023,00133	0,00	0,00	224,00	-2000,00	33-21-2763
21-03-20023,00160	0,00	0,00	4,310,00	-310,00	33-21-3359
27-03-20023,00126	0,00	0,00	0,00	-142,00	33-22-0097
27-03-20023,00130	0,00	0,00	394,00	-006,00	33-22-0000
27-03-20023,00134	0,00	0,00	1,103,00	-691,00	33-21-7642
27-03-20023,00101	0,00	0,00	100,00	-829,00	33-22-0001
27-03-20023,00105	0,00	0,00	1,110,00	-939,00	33-21-7000
27-03-20023,00109	0,00	0,00	313,00	-202,00	33-22-0732
28-03-20023,00242	0,00	0,00	2,000,00	-137,00	33-21-0151

MR. UNLI : GADAH BAHU

Kamari

Pemerintah RI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

## BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor : .....

Nama Wajib Pajak : .....

N P W P : .....

Alamat : .....

<u>Penghasilan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Tarif</u>	<u>PPh yang dipotong</u>
1. Honorarium : Rp .....		%	Rp .....
2. Imbalan lainnya : Rp .....		%	Rp .....
	Jumlah		Rp .....
			..... 19 .....

Perhatian :

Pemotong Pajak :

Nama : .....

N P W P : .....

Alamat : .....

tanda tangan  
dan cap

Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan anggaran atas pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sampai-sampai bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan

KP.PPh. 3-6.

Lampiran : NOSE.S.60-DIR/BUD/11/96.

**DAFTAR HADIR**  
**KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**  
**DI BRI UNIT GAJAH MADA JEMBER**

Oleh :  
**HERRY SUPRATMAN**  
NIM. 990903101073

NO.	HARI	TANGGAL	TTD
1.	SENIN	18 MARET 2002	
2.	SELASA	19 MARET 2002	
3.	RABU	20 MARET 2002	
4.	KAMIS	21 MARET 2002	
5.	JUMAT	22 MARET 2002	
6.	SENIN	25 MARET 2002	
7.	SELASA	26 MARET 2002	
8.	RABU	27 MARET 2002	
9.	KAMIS	28 MARET 2002	
10.	SENIN	01 APRIL 2002	
11.	SELASA	02 APRIL 2002	
12.	RABU	03 APRIL 2002	

Pembimbing  
Lapangan



Imam Agus M  
Deskman

Jember, 03 April 2002  
Pimpinan Perusahaan



Moch. Sholeh  
Ka. Unit



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)  
KANTOR CABANG JEMBER  
Jl. A. Yani No. 1 Telepon (0331) 483258, 427028 Jember

Nomor : B.1408-VIII/KCR/MKR/06/2002

Jember, 26 Juni 2002

Lampiran : ---o---

Perihal : Surat Keterangan Melaksanakan  
Kegiatan Magang Mahasiswa  
Diploma III Perpajakan UNEJ.

Ke p a d a  
Yth. Sdr Dekan FISIP  
Universitas Jember  
di -

JEMBER

Surat Dekan FISIP UNEJ Nomor : 895/J25.1.2/PP.6/2002, tgl. 18-03-2001 .

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember tentang Kegiatan Magang diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini telah melakukan Magang di lingkungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember selama 12 hari kerja

Adapun mahasiswa yang telah melaksanakan magang tersebut adalah :

1. Nama : Yusron Fatoni.  
N I M : 99-1145  
Bidang Studi : D.III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi.  
Tempat PKN : BRI Unit Sempusari.
2. Nama : Dian Sulistyorini  
N I M : 99-1147  
Bidang Studi : D.III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi.  
Tempat PKN : BRI Unit Sempusari.
3. Nama : Herry Supratman.  
N I M : 99-1073.  
Bidang Studi : D.III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi.  
Tempat PKN : BRI Unit Gajah Mada.

Demikian Surat Keterangan melaksanakan kegiatan magang dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)  
KANTOR CABANG JEMBER

Djarot Sudarsono

Ass. Manajer Bisnis Mikro



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 895 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Yusron Fatoni	99- 1145
2.	Dian Sulistyorini	99- 1147
3.	Herry Supratman	99- 1073

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Jember, selama 12 hari terhitung sejak tanggal 18 Maret  
2002 s/d tanggal 03 April 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti  
kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.  
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 18 Maret 2002



Dekan

Drs. H. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Sempusari
4. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Pa'rang
5. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Gajah Mada

brkudx:ug:ug:msword



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER